

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PASCA PANEN TANAMAN PADI

Lia Damita dan Sujianto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Evaluation Policy of Post-Harvest Handling Rice. This study aimed to evaluate the policy of post-harvest handling of rice plants and identify factors inhibiting the achievement of post-harvest handling of rice in this particular relevant institutions in Indragiri Hulu. This research uses a qualitative approach. Informants from the three agencies and community groups the informant set this study determined that the determination purposively sampled respondents pointed manner that is considered capable of providing a variety of data and information on post-harvest handling policy. Data was collected by way of documentation and field research studies. All of the data obtained will be analyzed by using descriptive qualitative. Based on the survey results revealed that the results of the evaluation of post-harvest handling of rice policies seen from all dimensions with good an answer as much as 21.5% this means that. Then the answer is quite as much as 47.9% this means that the implementation is quite good rice harvest handling. There are two factors that inhibit the implementation of post-harvest handling of rice policy, the first is the lack of motivation of citizens to farm rice. This is because of the choice for gardening and palm oil plantations more promising result tolerable.

Abstrak: Evaluasi Kebijakan Penanganan Pasca Panen Tanaman Padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan pasca panen tanaman padi dan mengetahui faktor penghambat pencapaian hasil penanganan pasca panen tanaman padi dalam hal ini khususnya institusi terkait di Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dari tiga instansi dan kelompok masyarakat maka ditetapkan informan penelitian ini ditetapkan secara purposive yaitu penetapan sampel dengan cara menunjuk responden yang dianggap mampu memberikan berbagai data dan informasi mengenai kebijakan penanganan pasca panen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan penelitian lapangan. Kesemua data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil evaluasi kebijakan penanganan pasca panen padi dilihat dari seluruh dimensi dengan jawaban baik sebanyak 21.5% ini berarti bahwa. Kemudian jawaban cukup sebanyak 47.9% ini berarti bahwa cukup baiknya pelaksanaan penanganan pascapanen padi. Terdapat dua faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penanganan pasca panen padi, pertama yaitu kurangnya motivasi dari warga masyarakat untuk bertani padi. Hal ini karena adanya pilihan untuk berkebun sawit dan perkebunan sawit lebih menjanjikan hasil yang lumayan.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, penanganan, pasca panen, tanaman padi

PENDAHULUAN

Ketersediaan pangan merupakan hal paling strategis mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Untuk itu sektor pertanian tidak akan pernah lepas dari fungsinya sebagai sumber utama penyediaan bahan pangan. Dalam meningkatkan ketahanan pangan, tantangan terbesar saat ini adalah konsumsi masih bertumpu pada beras, sehingga peningkatan produksi beras masih terus menjadi masalah utama. Pemenuhan kebutuhan bahan pokok ini menjadi tanggung jawab baik itu pemerintah, masyarakat ataupun swasta terutama dalam menunjang program ketahanan pangan.

Hak untuk memperoleh pangan menjadi salah satu hak azasi manusia. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dituangkan bahwa sebagai salah satu sasaran utama pembangunan, fungsi ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk negara dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk eksistensi hidup, sehat dan produktif.

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibanding kebutuhannya dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Pengalaman bangsa ini telah mem-

buktikan bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti melambungnya harga beras saat krisis ekonomi 1997/1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi, menjadi pemicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Hal inilah yang menempatkan beras sebagai bahan makanan pokok menjadi komoditas paling strategis, sehingga peningkatan produksi padi selalu terus diupayakan.

Hal ini menimbulkan perspektif bahwa keberhasilan sektor pertanian sampai saat ini masih dipandang dari sudut keberhasilan jumlah produksi, sehingga prioritas kebijakan pemerintah masih berpegang pada pencapaian target-target produksi. Bahkan kesuksesan di sektor pertanian lebih dikaitkan dengan tingkat produktivitas dan sejauh mana kemampuan menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kualitas produksi dan peningkatan nilai tambah sebagai akibat dari proses penanganan pasca panen masih terbatas pada program dan belum muncul sebagai indikator pencapaian target produksi nasional.

Peningkatan produksi sebagai tujuan dalam penyediaan pangan bagi masyarakat, bukan menjadi satu-satunya hal yang harus diperhatikan. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus oleh kita semua yaitu besarnya tingkat kehilangan hasil pada saat panen. Karena berapapun besarnya produksi yang dihasilkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan pangan jika tingkat kehilangan hasil tidak ditekan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian pada tahun 2005-2007, tingkat susut panen dan pasca panen gabah/beras secara nasional masih cukup tinggi yaitu sebesar 10,82 persen. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat tingkat susut panen dan pasca panen gabah/beras mencapai 10,37 persen. Tingginya angka susut panen dan pasca panen di karenakan belum baiknya penanganan pasca panen oleh petani. (<http://distan.sumbawakab.go.id>, 2011)

Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas wilayah 8.198,26 Km² atau 819.826 Ha yang terdiri dari empat belas kecamatan dan 172 desa dan kelurahan memiliki luas baku sawah pada

tahun 2011 seluas 17.209 Ha dan lahan baku kering seluas 802.618 Ha.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penanganan pasca panen di Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen dan juga sebagai pelaku pasar. Pada umumnya petani masih memperlakukan hasil produksi secara apa adanya, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu yang dihasilkan seperti tingginya tingkat kehilangan hasil, kondisi fisik produk yang jelek, tercampur bahan-bahan yang tidak layak, dan mudah patah. Semuanya itu mengakibatkan daya saing produk yang rendah dibandingkan produk daerah lain.

Masalah lain yang ditemukan adalah belum berkembangnya kelembagaan dalam pengertian perilaku, aturan dan organisasi panen dan pasca panen di tingkat petani. Beberapa masalah kelembagaan dalam pasca panen hasil pertanian antara lain sistem panen, panen seringkali dilakukan dengan sistem kelompok dan individual dimana terjadi proses mengedepankan kecepatan panen. Hal ini menyebabkan kurang diperhatikannya hasil panen. Selanjutnya kurang berkembangnya unit-unit pelayanan jasa alsintan (UPJA), karena lokasinya berjauhan dengan lokasi usaha tani yang terpencar-pencar dengan luasan yang sempit sehingga kurangnya pasokan bahan baku, kurangnya kemitraan akibat kurangnya pemahaman antara petani dan pengusaha UPJA dalam pengolahan hasil yang baik.

Kesemua hal tersebut membutuhkan campur tangan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan penanganan pasca panen melalui upaya-upaya keberpihakan pada program-program dan kegiatan pascapanen yang lebih proporsional dibandingkan dengan kegiatan pra panen, memotivasi petani dan stakeholder agar turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas penanganan pasca panen, membentuk dan membina kelembagaan-kelembagaan pasca panen di tingkat petani, penguatan modal petani dan pengusaha UPJA, serta meningkatkan mutu SDM baik petugas, petani maupun pengusaha alsintan.

Namun begitu, peran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam peningkatan penanganan pasca panen belum tentu berjalan dengan baik

seandainya komponen-komponen yang terlibat dalam program penanganan pasca panen belum berperan aktif sebagaimana mestinya. Peran serta kelompok tani dalam menekan tingkat kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas hasil pangan melalui penanganan pasca panen, menjadi salah satu kunci keberhasilan program penanganan pasca panen. Artinya harus ada hubungan yang sinergi antara pemerintah dan petani dalam meningkatkan pembangunan penanganan pasca panen di Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Nugroho (2006) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada didomain lembaga administratif publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan pasca panen tanaman padi dan mengetahui faktor penghambat pencapaian hasil penanganan pasca panen tanaman padi dalam hal ini khususnya institusi terkait di Kabupaten Indragiri Hulu.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dari tiga instansi dan kelompok masyarakat, maka ditetapkan informan penelitian ini ditetapkan secara purposive, yaitu penetapan sampel dengan cara menunjuk responden yang dianggap mampu memberikan berbagai data dan informasi mengenai kebijakan penanganan pasca panen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan penelitian lapangan. Kesemua data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Kebijakan Penanganan Pasca Panen Padi

Efektifitas

Evaluasi kebijakan penanganan pasca panen padi di Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari dimensi efektivitas secara keseluruhan dinilai cukup

baik, yaitu sebesar 45,3%. Hal ini berarti Tujuan kebijakan pemerintah dalam penanganan pasca panen baik peran pemerintah maupun usaha yang dilakukan petani padi dalam meningkatkan mutu, ataupun mutu rendemen padi serta daya saing rendemen padi tersebut cukup tercapai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para responden diketahui pemerintah cukup berperan dalam meningkatkan penanganan pasca panen dalam meningkatkan mutu panen padi. Artinya pemerintah telah melakukan usaha-usaha yang cukup signifikan untuk memperbaiki sistem penanganan pasca panen. Secara umum baik pemerintah maupun petani cukup berperan dalam tercapainya perbaikan penanganan pasca panen padi. Artinya tujuan pemerintah menjalankan program dan kegiatan untuk meningkatkan sistem penanganan pasca panen cukup berhasil.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka meningkatkan penanganan pasca panen padi telah melakukan penerapan dalam penggunaan alat mesin pertanian pasca panen dan petani walaupun belum secara keseluruhan juga telah mengikuti program yang diberikan pemerintah. Dalam hal untuk meningkatkan kualitas hasil rendemen padi, petani telah melakukan perbaikan mulai dari saat panen sampai ke proses penggilingan.

Efisiensi

Evaluasi kebijakan penanganan pasca panen padi di Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari kriteria efisiensi secara keseluruhan jawaban responden menilai cukup baik, yaitu sebesar 50,8%. Hal ini berarti bahwa sikap petani padi dalam rangka meningkatkan mutu panennya, aturan yang dibuat pemerintah dalam menindaklanjuti hasil panen padi, peran kelompok tani padi dalam menyikapi masalah yang terjadi pada proses pasca panen dan penerapan sistem pasca panen padi pada kelompok tani padi cukup efisien.

Berbicara masalah efisiensi mengarah kepada penggunaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan, penggunaan sumberdaya sudah cukup baik pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari positifnya jawaban responden

terhadap pertanyaan yang diajukan. Menurut Anoraga (2005) efisien adalah cermat, tidak membuang-buang waktu dan energi, juga merupakan usaha untuk memberantas segala pemborosan bahan dan tenaga kerja maupun gejala yang merugikan.

Kecukupan

Evaluasi kebijakan penanganan pasca panen padi di Kabupaten Inhu dilihat dari kriteria kecukupan secara keseluruhan dinilai kurang baik yaitu sebesar 40,6%. Hal ini berarti bahwa hasil yang diinginkan dalam hal pencapaian target produksi oleh petani padi selama ini, ketersediaan pelayanan unit alsintan, lokasi petani dengan keberadaan unit layanan jasa alsintan dan jalinan kerjasama petani dengan pihak yang berkepentingan dengan produksi padi dinilai masih kurang baik.

Kebijakan penanganan pasca panen padi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ditujukan untuk dapat mengurangi tingkat kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas rendemen padi yang dihasilkan. Namun berdasarkan penilaian pada kriteria kecukupan, dapat kita ketahui bahwa walaupun kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah cukup efektif dan efisien namun kurang dapat memecahkan masalah yang ada. Hal ini terbukti dari jawaban para responden tentang pencapaian target produksi yang diperoleh petani padi selama ini dinilai kurang baik (56,3%).

Secara teknis memang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil produksi tanaman, baik itu dari sistem budidaya sampai ke penanganan pasca panen. Untuk dapat menghasilkan produksi yang lebih baik diperlukan adanya dukungan dalam perbaikan sistem budidaya baik penggunaan benih unggul dengan penggunaan pupuk yang sesuai anjuran, sistem pengairan yang tepat, pengelolaan hama penyakit yang terpadu. Jika hal ini semua telah terpenuhi sehingga telah dihasilkan padi dengan bulir yang berkualitas, system penanganan pasca panen mempunyai peranan penting selanjutnya.

Dalam rangkaian proses produksi, bahan baku dan produk adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, demikian juga dalam proses pengo-

lahan padi menjadi beras. Untuk mendapatkan gabah yang baik harus didukung oleh teknologi budidaya (aktivitas *on-farm*) yang mampu meningkatkan kualitas gabah, sehingga beras yang diperoleh memiliki kualitas lebih baik dengan rendemen yang maksimal (sekitar 65 - 68 %). (Sutrisno, 2012).

Perataan

Evaluasi kebijakan penanganan pasca panen padi di Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari dimensi perataan secara keseluruhan dinilai cukup baik yaitu sebesar 53,1%. Hal ini berarti menurut responden bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan hasil panen, pemahaman petani terhadap pengelolaan pasca panen padi, jalinan kemitraan antara petani dengan pengusaha serta hasil pengolahan pasca panen padi selama ini secara keseluruhan dinilai cukup merata.

Pada kriteria ini, yang dimaksudkan untuk melihat pemerataan biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan kepada kelompok-kelompok petani padi yang ada di lokasi, menghasilkan penilaian yang berbeda-beda pada masing-masing item penilaian. Pada item penilaian bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan hasil panen padi menunjukkan bahwa para responden menilai baik (53,1%), artinya sebanyak 53,1% responden menilai bantuan yang diberikan pemerintah cukup merata. Hal ini dapat dibandingkan dengan tersedianya unit-unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) yang ada hampir disetiap desa sebagaimana yang telah dibahas pada kriteria kecukupan diatas, walaupun dari segi jumlah belum memadai.

Selanjutnya pada item penilaian mengenai pemahaman petani padi terhadap pengelolaan hasil pasca panen padi, diketahui bahwa menurut 62,5% responden petani cukup memahami pengelolaan pasca panen padi. Walaupun dari pantauan penulis di lapangan masih terdapat petani-petani yang kurang memahami cara-cara penanganan pasca panen padi yang benar.

Dari hasil wawancara dengan petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Kuala Cenaku, diketahui bahwa masih terdapat petani yang me-

ngabaikan umur panen padi untuk menghindari kendala-kendala di lapangan. Hal ini dinyatakan oleh petugas penyuluh pertanian bahwa petani seringkali memanen padi lebih cepat karena kondisi yang ada di lapangan, yaitu takut akan serangan hama walang sangit dan burung, sehingga menyebabkan padi banyak yang patah pada saat penggilingan.

Responsivitas

Evaluasi kebijakan penanganan pasca panen padi di Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari kriteria responsivitas secara keseluruhan dinilai cukup baik yaitu sebesar 46,9%. Hal ini berarti menurut responden bahwa kebijakan pemerintah cukup memuaskan baik itu respon pemerintah terhadap keluhan petani padi. Penentuan arah pembangunan pertanian khususnya padi, program yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan hasil panen padi dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan motivasi kepada petani padi.

Kriteria ini dimaksudkan untuk melihat apakah kebijakan penanganan pasca panen yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan pelaku pasca panen baik itu petani atau *stakeholder* lainnya. Pada item penilaian mengenai respon pemerintah terhadap keluhan petani padi, 50% responden menilai baik, artinya pemerintah daerah mempunyai responsivitas yang baik terhadap keluhan petani padi.

Hasil dari penelitian di lapangan, beberapa tahun terakhir pemerintah daerah cukup respon dalam upaya meningkatkan hasil rendemen padi melalui peningkatan penanganan pasca panen. Selama ini petani mengeluh bahwa mereka masih kekurangan alat pasca panen. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa pengadaan alsintan pasca panen. Hanya saja kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan tersebut belum dapat terlaksana secara merata, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Menurut aparat yang bertugas ada beberapa alasan kenapa hal ini belum dapat teratasi sepenuhnya, salah satunya terbatasnya anggaran

yang dimiliki oleh Satker terkait untuk dapat intensif menangani permasalahan pasca panen, karena perhatian pemerintah masih fokus pada peningkatan jumlah produksi sehingga pendanaan masih tersedot untuk perluasan areal serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Hasil Penanganan Pasca Panen Padi

Berdasarkan hasil yang ditemui di lapangan dan wawancara dengan para responden, baik itu petani ataupun petugas lapangan terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian hasil penanganan pasca panen padi di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut aparat yang bertugas di lapangan, diketahui bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penanganan pasca panen padi adalah motivasi warga yang kurang, karena petani masih mengharapkan pemerintah dapat menampung hasil produksi mereka sehingga mereka lebih bersemangat. Kurangnya pemahaman petani tentang makna penanganan pasca panen padi. Selain itu juga kurang jelasnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta aturan-aturan yang memberlakukan standar oprasioanl penanganan pasca panen.

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penanganan pasca panen padi di Kabupaten Indragiri Hulu. *Pertama*, kurangnya motivasi dan pemahaman petani mengenai standar operasional penanganan pasca panen padi. *Kedua*, belum adanya aturan baku tentang penanganan pascapanen dari pemerintah daerah, dan belum meratanya pembangunan pasca panen itu sendiri.

Kemudian daripada itu juga jelas dapat diketahui dengan kebijakan penanganan pasca panen padi masih kurang mendapatkan standar sehingga hasil padi kurang berkualitas bila dibandingkan dengan produksi daerah lain. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Edward III (1980) bahwa terdapat empat variabel yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi (*communication*), dimana komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi

kebijakan sebab komunikasi sarana untuk menyebarkan informasi baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Dalam hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi tentang penataan organisasi, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, isi informasi harus jelas serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaiannya.

Kemudian Sumber-sumber (*resources*), dimana sumber-sumber memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena tidak akan efektif apabila sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai. Sumber-sumber dimaksud dalam hal ini adalah unsur staf sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, dukungan lingkungan kerja serta adanya wewenang untuk melaksanakan kebijakan pelayanan umum.

Selanjutnya Disposisi sikap (*disposition and attitude*), dimana dalam hal ini hal yang terpenting dalam implementasi kebijakan pelayanan umum adalah sikap petugas pelayanan yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dan terakhir adalah Struktur birokrasi (*bureaucratie structure*), dimana suatu kebijakan seringkali melihat lembaga atau organisasi dalam implementasinya dan memerlukan koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga atau organisasi terkait.

SIMPULAN

Evaluasi kebijakan penanganan pasca panen padi di Kabupaten Inhu dilihat dari seluruh dimensi dengan jawaban baik sebanyak 21.5% dan jawaban cukup sebanyak 47.9%. Ini berarti bahwa cukup baiknya pelaksanaan penanganan

pascapanen padi di Kabupaten Indragiri Hulu. Terdapat dua faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penanganan pasca panen padi. *Pertama*, kurangnya motivasi dari warga masyarakat untuk bertani padi. Hal ini karena adanya pilihan untuk berkebun sawit dan perkebunan sawit lebih menjanjikan hasil yang lumayan. *Kedua*, ketidakjelasan program dari pemerintah sehingga program terkesan tidak punya standar yang jelas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin Said, Zainal, 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Curah
- Anoraga, Pandji dan Janti Soegiantoeti, 2005, *Pengantar Bisnis Modern*, Semarang: Penerbit Pustaka
- Edward III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Inc
- Nugroho, Riant D., 2006, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Sigit, 2003, *Perilaku Organisational*, Yogyakarta: Lukman Offset
- Sondang P. Siagian, 2001, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Subejo, 2006, *Bahan Ajar Sosiologi Pertanian*, Yogyakarta: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM
- Wibawa. Samodra, dkk. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- William, N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.